



Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money* : Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2023

Nabilatun Nihayatuz Zuhuriyyah^{1*}, Nufaisa²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : nabilatun18@gmail.com^{1*}, nufaisa@uinsa.ac.id²

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Korespondensi penulis: nabilatun18@gmail.com

Abstract. *This study aims to measure the financial performance of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Lamongan Regency in 2019–2023 based on the Value for Money concept which includes the principles of economy, efficiency, and effectiveness. The method used is descriptive qualitative with a case study approach, collecting primary data through interviews and observations and secondary data from the Budget Realization Report (LRA) and other supporting documents. The results of the ratio analysis show that the management of regional spending during this period is classified as economical with an average ratio of 93.61%, and balanced efficient with an average efficiency ratio of 100.70%. However, the effectiveness of regional revenue is still fluctuating and mostly ineffective, mainly due to the low realization of revenue from taxes, levies, and grants. The implications of this study emphasize the need to increase the utilization of regional potential and revenue management so that financial targets can be achieved optimally, so that public services and regional development can run more effectively and sustainably.*

Keywords: *Economic, Effectiveness, Efficiency, Financial Performance, Value for Money.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan tahun 2019–2023 berdasarkan konsep *Value for Money* yang meliputi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dokumen pendukung lainnya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah selama periode tersebut tergolong ekonomis dengan rata-rata rasio 93,61%, serta efisien berimbang dengan rata-rata rasio efisiensi 100,70%. Namun, efektivitas pendapatan daerah masih fluktuatif dan sebagian besar tidak efektif, terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan dari pajak, retribusi, dan dana hibah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan pemanfaatan potensi daerah dan pengelolaan pendapatan agar target keuangan dapat tercapai secara optimal, sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomis, Efektivitas, Efisiensi, Kinerja Keuangan, *Value for Money*.

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah memberikan hak bagi pemerintah daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah dituntut untuk efisien dan efektif. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi lokal, serta tantangan global menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur kewajiban pelaporan keuangan daerah secara lengkap dan akuntabel, serta Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan dengan berbagai komponen seperti LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan lainnya.

Menurut (Aritonang, 2022: 1), Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, Pengelolaan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah, terutama karena peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta (Mardiasmo, 2018: 151-152). Oleh karena itu, konsep *value for money* menjadi pendekatan ideal dalam mengelola keuangan daerah, dengan menekankan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penerapan konsep ini diharapkan mampu mendorong pelayanan yang berkualitas, penggunaan sumber daya secara optimal, serta pengurangan pemborosan dan kebocoran anggaran.

Tabel 1. 1 LRA Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 – 2023

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2019	Pendapatan Daerah	2.997.798.697.186,00	2.864.496.711.416,86	95,55%
	Belanja	3.038.634.831.480,51	2.875.512.218.177,60	94,63%
2020	Pendapatan Daerah	2.974.914.693.684,05	2.838.272.211.782,49	95,41%

	Belanja	3.011.486.940.190,82	2.823.137.926.114,77	93,75%
2021	Pendapatan Daerah	2.972.747.645.504,00	2.975.019.936.520,51	100,08%
	Belanja	3.022.672.092.110,00	2.871.007.882.801,56	94,98%
2022	Pendapatan Daerah	3.063.580.043.532,00	2.933.713.997.200,59	95,76%
	Belanja	3.381.346.115.286,00	3.188.162.740.326,07	94,29%
2023	Pendapatan Daerah	3.542.019.128.250,00	3.209.621.138.515,87	90,62%
	Belanja	3.496.657.836.546,00	3.161.814.099.392,23	90,42%

Sumber : (BPKAD Kabupaten Lamongan, n.d.)

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lamongan tahun 2019–2023, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah cenderung konsisten di atas 90%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian pendapatan menjadi 90,62%, terendah dalam lima tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya pendapatan dari pajak dan retribusi daerah akibat ketidakpatuhan wajib pajak, seperti pelaporan omset yang tidak sesuai dan penghindaran sistem tapping box (Setiawan, 2024: 2). Selain itu, masih ada beberapa aset daerah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber potensi ekonomi dan wisata daerah (Sari & Laily, 2024).

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh (Talitha et al., 2023: 279-287), bahwa pendapatan daerah dinyatakan tidak efektif pada tahun 2020-2021 dikarenakan sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya memberikan pemasukan terhadap pendapatan daerahnya, sehingga PAD masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer Pusat maupun Provinsi. Hal ini dikarenakan dana pemerintah daerah yang bersumber dari pemerintah pusat masih didominasi dan belum adanya pemanfaatan sumber daya potensi daerah itu sendiri. Sedangkan menurut (Syahirah et al., 2023: 52-53), pendapatan daerah dinyatakan tidak efektif karena PAD mengalami penurunan sehingga penganggaran atau target yang telah ditetapkan pemerintah belum dikelola secara baik sehingga untuk pelayanan terhadap masyarakat belum terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 menetapkan lima program kerja prioritas dengan anggaran sekitar Rp3,717 triliun untuk pembangunan, seperti diungkapkan dalam rapat paripurna DPRD. Dalam adanya lima program kerja tersebut ada beberapa yang masih belum dilaksanakan secara optimal salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan yang ada di perkotaan maupun perdesaan yang ada diberbagai kecamatan yang kurang bagus dan kurangnya jalan penerang (Ali, 2022).

Penerapan prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya tercermin. Meskipun terdapat efisiensi dari sisi belanja, data terkait *output* atau *outcome* yang dihasilkan masih minim. Efisiensi belanja tidak cukup jika tidak diiringi dengan efektivitas (mencapai tujuan yang direncanakan) dan ekonomis (memanfaatkan sumber daya secara optimal). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendekatan *value for money* guna mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money* : Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019 – 2023”**

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Mardiasmo, 2018: 1-3), akuntansi sektor publik merupakan cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan di organisasi yang berada dalam ranah publik, seperti lembaga pemerintah, perusahaan milik negara, dan organisasi nirlaba.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut *American Accounting Association* (1970) yang dikutip oleh (Maretha, n.d.), menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik meliputi dua hal utama, yaitu :

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola kegiatan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, tepat, dan hemat.
2. Menyediakan informasi agar manajer bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan program dan penggunaan dana, serta membantu pemerintah menyampaikan laporan hasil kerja dan penggunaan dana publik kepada masyarakat.

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja di sektor publik adalah sistem yang digunakan untuk membantu manajer dalam menilai keberhasilan program, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan (Mulyani, 2023). Tujuan dari pengukuran ini antara lain :

1. Meningkatkan kinerja pemerintah dengan cara memastikan program berjalan sesuai tujuan dan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.
2. Mendukung pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya dengan mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki agar anggaran bisa digunakan lebih tepat.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat tahu bagaimana pemerintah bekerja dan bagaimana dana publik digunakan.

Value For Money

Menurut (Mardiasmo, 2018: 160), konsep *value for money* merupakan elemen utama untuk mengukur kinerja organisasi pemerintah. Kinerja ini bukan hanya dilihat dari hasil *output* saja, tetapi harus mempertimbangkan semua komponen, termasuk *input*, dan hasil akhir (*outcome*) secara bersamaan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan konsep *Value for Money* pada tahun 2019 - 2023.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, sedangkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019–2023 serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara kepada staf terkait, observasi langsung atas kinerja keuangan, serta dokumentasi berbagai laporan keuangan dan dokumen resmi lainnya untuk mendukung keakuratan data penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan dokumentasi laporan keuangan dan wawancara mendalam. Data dianalisis menggunakan metode rasio *Value for Money*, dengan tolok ukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Rasio Ekonomis

Pengukuran Rasio ekonomi dilakukan dengan membandingkan input dan output yang dinyatakan dalam satuan moneter. Konsep ekonomi bertujuan untuk menilai seberapa optimal penggunaan sumber daya dan biaya yang dikeluarkan. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1 Kriteria Ekonomi

Presentase	Kriteria
<100 %	Ekonomis
100 %	Ekonomis Berimbang
>100 %	Tidak Ekonomis

Sumber : Buku Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018: 167-169)

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran Rasio efisiensi mengacu pada perbandingan output dengan input. Efisiensi menjadi indikator penting dalam konsep *Value for Money*, di mana semakin tinggi output yang dihasilkan terhadap input, maka semakin efisien suatu organisasi. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Pemerintah}} \times 100\%$$

Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi

Presentase	Kriteria
<100 %	Efisien
100 %	Efisien Berimbang
>100 %	Tidak Efisien

Sumber : Buku Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018: 167-169)

3. Rasio Efektivitas

Pengukuran Rasio efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hanya menilai sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil memenuhi targetnya. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pemerintah}}{\text{Anggaran Pendapatan Pemerintah}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3 Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
<100 %	Tidak Efektif
100 %	Efektif Berimbang
>100 %	Efektif

Sumber : Buku Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018: 167-169)

Proses analisis meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Lamongan Tahun Anggaran 2019–2023 berdasarkan prinsip penggunaan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian benar, akurat, dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2022: 267-269). Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu menguji konsistensi data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi teknik digunakan untuk memastikan validitas dan akurasi data dalam mendukung analisis kinerja keuangan berdasarkan konsep *Value for Money*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Rasio Ekonomis

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai rasio ekonomi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Perhitungan Rasio Ekonomis

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	%	Keterangan
2019	2.875.512.218.177,60	3.038.634.831.480,51	94,63%	Ekonomis
2020	2.823.137.926.114,77	3.011.486.940.190,82	93,75%	Ekonomis
2021	2.871.007.882.801,56	3.022.672.092.110,00	94,98%	Ekonomis
2022	3.188.162.740.326,07	3.381.346.115.286,00	94,29%	Ekonomis
2023	3.161.814.099.392,23	3.496.657.836.546,00	90,42%	Ekonomis

Sumber : LRA Kabupaten Lamongan setelah diolah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomi yang telah diringkas dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun (2019-2023) Pemerintah Kabupaten Lamongan berada dalam kategori ekonomis dengan nilai rata - rata 96,36% hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menekan belanja daerah sehingga tidak adanya pemborosan. Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan terus menggunakan belanja daerah secara optimal, memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan output yang maksimal tanpa adanya pemborosan.

Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai rasio efisiensi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Pemerintah	%	Keterangan
2019	2.875.512.218.177,60	2.864.496.711.416,86	100,38 %s	Efisien Berimbang
2020	2.823.137.926.114,77	2.838.272.211.782,49	99,46%	Efisien
2021	2.871.007.882.801,56	2.975.019.936.520,51	96,50%	Efisien
2022	3.188.162.740.326,07	2.933.713.997.200,59	108,67%	Tidak Efisien
2023	3.161.814.099.392,23	3.209.621.138.515,87	98,51%	Efisien

Sumber : LRA Kabupaten Lamongan setelah diolah

Berdasarkan rata-rata perhitungan rasio efisiensi selama lima tahun (2019-2023) sebesar 100,70%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah berada dalam kategori efisiensi berimbang. Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dikatakan efisien jika realisasi belanja daerah tidak melebihi pendapatan yang diperoleh. Efisiensi dapat tercapai apabila kegiatan operasional mampu menghasilkan output atau layanan dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang minimal, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rasio Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai rasio efektif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Pendapatan Pemerintah	Anggaran Pendapatan Pemerintah	%	Keterangan
2019	2.864.496.711.416,86	2.997.798.697.186,00	95,55%	Tidak Efektif
2020	2.838.272.211.782,49	2.974.914.693.684,05	95,41%	Tidak Efektif
2021	2.975.019.936.520,51	2.972.747.645.504,00	100,08%	Efektif Berimbang
2022	2.933.713.997.200,59	3.063.580.043.532,00	95,76%	Tidak Efektif
2023	3.209.621.138.515,87	3.542.019.128.250,00	90,62%	Tidak Efektif

Sumber : LRA Kabupaten Lamongan setelah diolah

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, dari tahun 2019 hingga 2023, rasio efektivitas pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan menunjukkan fluktuasi dengan sebagian besar berada dalam kategori tidak efektif yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Lamongan masih belum efektif dalam merealisasikan target pendapatan. Dilihat dari LRA tahun 2019-2023 reandahnya realisasi pendapatan dikarenakan beberapa faktor yaitu pendapatan transfer yang rendah, pad dan dana hibah tidak cair

PEMBAHASAN

Rasio Ekonomis

Analisis rasio ekonomi Pemerintah Kabupaten Lamongan selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah berada dalam kategori ekonomis, dengan rata-rata rasio ekonomi sebesar 93,61%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola belanja secara optimal dan efisien, sesuai dengan prinsip ekonomi dalam konsep *Value for Money*. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara saya kepada pegawai disana bahwa sebelum pelaksanaan program, perencanaan anggaran dilakukan dengan matang oleh pihak terkait (diskusi), sehingga penggunaan dana tetap terkontrol dan tidak boros.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Nansi et al., 2025) yang menunjukkan bahwa rasio ekonomi di bawah 100% menandakan pengelolaan anggaran yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar prinsip ekonomi dalam pengelolaan keuangan daerah tetap konsisten diterapkan.

Rasio Efisiensi

Analisis rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Lamongan selama periode 2019-2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan nilai rata-rata sebesar 100,38% . Di mana pada tahun 2019 dengan hasil 100,38% dikatakan efisiensi berimbang dan pada tahun 2022 terjadi lonjakan rasio efisiensi hingga 108,67%, yang mencerminkan ketidakefisienan. Dilihat dari hasil LRA tahun 2019 bahwa dikatakan efisiensi berimbang akibat realisasi padnya masih rendah, namun pada tahun 2022 dikatakan tidak efisien akibat ketidakseimbangan perencanaan anggaran belanja dan pendapatan, belanja transefer yang tinggi serta pendapatan transfer yang rendah. hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara bahwa kontribusi pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan meskipun masih tergolong kurang optimal, sedangkan retribusi daerah memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD. Meskipun penerimaan dari kedua sumber ini mengalami fluktuasi, tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi rata-rata mencapai 11%. Namun, keduanya belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Penelitian ini tidak selaras dengan teori *Agency Service Performance*, yang menekankan bahwa pemerintah sebagai pengelola keuangan publik harus memastikan pengeluaran yang dilakukan memberikan manfaat optimal dengan biaya minimal (Riska et al., 2022). Tetapi penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Antasena et al., 2023), menjelaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang matang serta efektivitas pengendalian belanja.

Rasio Efektivitas

Analisis rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Lamongan selama periode 2019-2023 dengan rata-rata 95,48%, hasil tersebut dikategorikan tidak efektif. Dilihat dari LRA tahun 2019-2023 penurunan ini terjadi adanya permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah, seperti rendahnya realisasi pajak dan retribusi daerah serta ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Hasil tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara bahwa rendahnya capaian tersebut karena tidak tercapainya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional akibat adanya pandemic.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2023), menyebutkan bahwa efektivitas pendapatan daerah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya lokal dan memperkuat sistem administrasi pajak serta retribusi. Oleh karena itu, langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kapasitas dalam pemungutan pajak daerah, digitalisasi layanan pajak, serta penyusunan target pendapatan yang lebih realistis. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu meningkatkan efektivitas pendapatan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dapat ditingkatkan, mendukung stabilitas fiskal, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan tahun 2019-2023 dengan pendekatan Value for Money, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah telah berjalan ekonomis dengan rata-rata rasio 93,61% dan efisien berimbang dengan rata-rata 100,70%. Namun, efektivitas pendapatan daerah masih fluktuatif dan sebagian besar tahun berada dalam kategori tidak efektif, terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana hibah yang tidak cair.

Saran

Dalam meningkatkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memperkuat pengawasan belanja, menerapkan strategi perencanaan anggaran yang lebih optimal, serta meningkatkan transparansi dalam pengadaan

barang dan jasa. Digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak dan pembayaran retribusi dapat membantu meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan daerah. Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat melalui optimalisasi sumber daya lokal, mendorong investasi, serta meningkatkan peran BUMD dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin optimal, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali. (2022). *Pemkab Lamongan tetapkan 5 Prioritas Pembangunan*. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. <https://kominformojatimprov.go.id/berita/pemkab-lamongan-tetapkan-5-prioritas-pembangunan>
- Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 51–70. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1506>
- Aritonang, R. I. (2022). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara*. 1–9. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- BPKAD Kabupaten Lamongan*. (n.d.). <https://bpkad.lamongankab.go.id/>
- Dewi, S. M., Kurnia, D., & Haryadi, E. (2023). Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 2(2), 83–94. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1395>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In Mardiasmo (Ed.), *ANDI* (Virgo Napi).
- Maretha, D. (n.d.). *AKUNTANSI PEMERINTAHAN*.
- Mulyani, T. (2023). *Pengukuran Kinerja dalam Organisasi Sektor Publik: Pengertian, Tujuan, Kendala, Konsep, Pendekatan*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/trimulyani2532/6543fac3ee794a4df86c62c3/pengukuran-kinerja-dalam-organisasi-sektor-publik-pengertian-tujuan-kendala-konsep-pendekatan>
- Nansi, M. R., Hidayati, F., Susanti, M. E. N. T., & Dewitasari, R. P. (2025). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta 2020-2023. *Manajemen & Bisnis*, 8(2), 64–75.

- Riska, R., Yamin, N. Y., & Jurana, J. (2022). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(1), 77–86. <https://doi.org/10.24853/jago.3.1.77-86>
- Sari, N. M., & Laily, R. N. (2024). *Potret Kota Paling Maju di Lamongan Sejak Ratusan Tahun Silam, Banyak Bangunan Megah Kini Terbengkalai*. merdeka.com. <https://www.merdeka.com/jatim/potret-kota-paling-maju-di-lamongan-sejak-ratusan-tahun-silam-banyak-bangunan-megah-kini-terbengkalai-95943-mvk.html?page=8>
- Setiawan, A. Y. (2024). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. 12, 1–12. [http://eprints.ipdn.ac.id/17808/1/REPOSITORY AGENG YUDHA S.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/17808/1/REPOSITORY%20AGENG%20YUDHA%20S.pdf)
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Syahirah, Yafiz, M., & Hasibuan, N. F. A. (2023). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Menggunakan Value for Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(4), 40–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i4.1623> Analisis
- Talitha, A., Armeliza, D., & Khairunnisa, H. (2023). Analysis Of the Value for Money in Measuring the Financial Performance of Pamekasan District Government for Fiscal Year 2017-2021. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 1(1), 279–289. <https://doi.org/10.21009/isc-beam.011.19>